

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki jumlah penduduk sangat besar. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa (BPS, 2021). Sementara itu, proyeksi BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi sekitar 281,6 juta jiwa. Jumlah penduduk yang sangat besar ini di satu sisi dapat menjadi potensi berupa ketersediaan sumber daya manusia, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial-ekonomi apabila tidak dikelola dengan baik.

Populasi penduduk sebesar ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat seperti kemacetan, kemiskinan, dan lain-lain. Kemiskinan dan ketidaksetaraan selalu menjadi topik sensitif untuk setiap negara, terutama di Indonesia. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Akibat situasi kemiskinan ini, berdampak terhadap eksistensi masyarakat (multiplier effects) dalam tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. (Fakhra et al., 2022)

Salah satu masalah mendasar yang masih dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Menurut BPS, persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36% atau sekitar 25,90 juta orang. Angka ini menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir, tetapi jumlah absolut penduduk miskin masih relatif tinggi. Kemiskinan di Indonesia memiliki karakter multidimensi, bukan hanya soal pendapatan yang rendah, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial (BPS, 2023).

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, seperti perluasan kesempatan kerja, Pembangunan, pertanian. Meskipun demikian, gejala kemiskinan di Indonesia belum sepenuhnya teratasi. Dalam upaya mengatasi masalah kesejahteraan sosial, khususnya peningkatan standar hidup, pemerintah perlu menerapkan kebijakan bantuan sosial. Kebijakan ini dapat berupa bantuan tunai atau bantuan berupa barang. Bantuan sosial ini dapat diartikan sebagai bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat prasejahtera yang merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat miskin tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang, program bantuan sosial diantaranya yaitu Program PKH. Program Harapan Keluarga (PKH) adalah salah satu inisiatif perlindungan sosial Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini dialokasikan kepada keluarga miskin dan hampir miskin yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu yang terdaftar dalam Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Secara khusus, PKH merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, dengan tujuan utama memutus siklus kemiskinan antar generasi. Program ini dikenal secara internasional sebagai Transfer Tunai Bersyarat (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah memainkan peran penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan untuk memberikan akses kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya ibu hamil dan anak-anak kecil, terhadap fasilitas dan layanan kesehatan, serta akses kepada anak-anak usia sekolah terhadap fasilitas dan layanan pendidikan yang tersedia di daerah mereka. Saat ini, manfaat PKH juga telah diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lansia, guna melindungi kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Selain mendorong KPM untuk memanfaatkan layanan sosial dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, KPM penerima PKH juga menerima dukungan berkelanjutan dalam mengakses program-program pelengkap. Dengan demikian,

PKH diposisikan untuk menjadi pusat keunggulan dalam upaya memerangi kemiskinan di Indonesia. (*Buku Pedoman PKH*, n.d.)

Menurut Kementerian Sosial (2009:122) dalam Irawan, (2020), pendampingan adalah proses sosial antara pendamping sosial dengan klien yang tujuannya untuk memecahkan masalah, memberikan dukungan tambahan dan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Dalam menjalankan tugas pendampingan, pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berperan dalam membentuk kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan wilayah dampingannya. Pembentukan kelompok ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pendampingan, meningkatkan kapasitas keluarga penerima manfaat, memperlancar pemutakhiran data, mendukung kegiatan monitoring penyaluran bantuan, serta menjadi wadah dalam penyelesaian permasalahan selama pelaksanaan program. Proses pembentukan kelompok dilakukan melalui tahapan identifikasi domisili dan potensi masing-masing KPM, pembagian anggota kelompok yang berjumlah 10 hingga 30 orang dengan mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal, serta jika memungkinkan, berdasarkan jenis tujuan tertentu seperti usaha ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Selanjutnya, ditetapkan tujuan kelompok, dipilih pengurus kelompok beserta uraian peran dan tugasnya, serta diidentifikasi kebutuhan kelompok, baik administratif maupun teknis. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, pendamping PKH senantiasa berpedoman pada kode etik pendamping sosial dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Wijaya, 2019 Keluarga penerima manfaat PKH sebagian besar memiliki pendidikan yang relatif rendah hal ini yang menjadikan mereka tidak dapat mengembangkan potensi dirinya, melalui edukasi dan proses pembelajaran kepada KPM dapat memberikan pengetahuan, sehingga memiliki pemahaman yang baik Hal ini menjadi salah satu yang menjadikan PKH menjadi sangat efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh Kelompok Penerima Manfaat, karena adanya edukasi yang meningkatkan kapasitas pengetahuan KPM melalui kegiatan peningkatan pertemuan kemampuan keluarga (P2K2). Guna terjadinya perubahan

perilaku KPM, diperlukan edukasi berkelanjutan yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang juga dikenal dengan *Family Development Session* (FDS), merupakan bentuk intervensi terstruktur yang berfokus pada perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Kegiatan ini diberikan sejak tahun pertama kepesertaan PKH dan dilaksanakan secara rutin melalui pertemuan kelompok bulanan yang difasilitasi oleh Pendamping Sosial PKH pada wilayah dampingannya.

Menurut Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di wilayah tersebut tercatat sekitar 98.313 keluarga yang tersebar di 39 Kecamatan. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dalam merubah perilaku ketergantungan pada bantuan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping tidak hanya bertindak sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan agen perubahan agar pelaksanaannya pada KPM yang tepat dan berjalan sesuai rencana.

Di Desa Cisaruni, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan temuan awal penelitian, terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain rendahnya kesadaran sebagian masyarakat bahwa mereka sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Selain itu, Masih adanya mekanisme penetapan kelayaakan yang belum maksimal. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan yang telah diterima dalam jangka waktu Panjang. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai Upaya Pendamping Prgram Keluarga Harapan berkontribusi dalam merubah Perilaku ketergantungan pada Bantuan Sosial khususnya di Desa Cisaruni. Selanjutnya penulis memfokuskan pada proses yang di jalankan oleh pendamping sebagai agen perubahan yang membantu masyarakat karena penelitian sebelumnya

hanya mengukur capaian program melalui data saja tanpa menyinggung aspek sikap, motivasi dan kemandirian.

Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“Upaya Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Merubah perilaku Ketergantungan Pada Bantuan Sosial (Studi Pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Cisaruni)”** adalah subjek yang menarik bagi penulis berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah yaitu: Bagaimana Upaya Pendamping Program Keluarga Harapan dalam merubah Perilaku Ketegantungan pada Bantuan Sosial (Studi Pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Cisaruni).

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Upaya Pendamping

Upaya pendamping merupakan serangkaian langkah, strategi, dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memahami, memanfaatkan, serta mengelola bantuan sosial secara tepat guna. Upaya ini tidak hanya berupa pemberian informasi, tetapi juga mencakup bimbingan, edukasi, motivasi, serta pengawasan agar penerima bantuan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam konteks perubahan perilaku ketergantungan pada bantuan sosial, upaya pendamping diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran, kemandirian, serta tanggung jawab KPM melalui kegiatan terstruktur. Dengan memberikan dukungan dan inspirasi, seorang pendamping membantu masyarakat yang menjadi dampingannya dalam menjalankan kewajiban sosial mereka. Pendamping PKH sangat diperlukan karena sebagian Masyarakat tidak memiliki kewenangan dan hak untuk berbicara. Oleh karena itu upaya pendamping menjadi instrumen penting dalam memastikan tujuan program tercapai, yaitu membentuk masyarakat yang tidak sekadar bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu mandiri secara berkelanjutan.

1.3.2 Program PKH

Program PKH merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2007 dengan mengacu pada praktik *conditional cash transfer* (CCT) yang banyak diterapkan di berbagai negara. Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya memperoleh bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga pendampingan dan pembinaan agar bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai ketentuan, seperti memastikan anak bersekolah, ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan, serta lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan layanan sosial yang layak.

1.3.3 Perilaku Ketergantungan KPM

Perilaku ketergantungan KPM pada bantuan sosial merupakan suatu kondisi ketika individu atau kelompok penerima bantuan lebih mengandalkan pemberian dari pemerintah atau lembaga sosial sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga menurunkan motivasi dan inisiatif mereka untuk meningkatkan kemandirian ekonomi maupun kualitas hidup secara mandiri. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), ketergantungan ini ditandai dengan sikap pasif penerima manfaat (KPM), kurangnya upaya untuk mencari alternatif pendapatan lain, serta persepsi bahwa bantuan sosial adalah hak yang akan terus diberikan tanpa syarat. Perilaku tersebut dapat menghambat tujuan program, yaitu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong kemandirian keluarga miskin.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah, adalah untuk mengetahui Upaya Pendamping Program Keluarga Harapan dalam merubah Perilaku Ketergantungan pada Bantuan Sosial (Studi Pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Cisaruni).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, peningkatan pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya., khususnya dalam bidang Pendidikan Masyarakat. Serta berperan dalam pengembangan kajian ilmiah mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Secara lebih khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Upaya Pendamping Program Harapan dalam merubah perilaku ketergantungan pada bantuan sosial di Desa Cisaruni.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menguntungkan semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Pendamping PKH

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan strategi baru dalam menghadapi Keluarga penerima manfaat yang masih memiliki pola pikir ketergantungan terhadap bantuan sosial. Temuan dari penelitian ini bisa dijadikan acuan metode pendampingan yang lebih efektif.

2. Bagi KPM

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan transisional, sehingga tidak boleh dijadikan sumber penghidupan utama. Melalui hasil penelitian, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk mengembangkan usaha mandiri, pendidikan anak, serta pola hidup produktif.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar evaluasi kebijakan dalam memperbaiki mekanisme PKH. Dengan mengetahui faktor penyebab ketergantungan, pemerintah dapat merancang kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat aspek pemberdayaan dibandingkan sekadar memberikan bantuan material.